

Arahan Peningkatan Investasi Daerah di Kota Batam Berdasarkan Faktor Ketenagakerjaan, Pelayanan Infrastruktur dan Lahan

Nur Sa'dah dan Eko Budi Santoso

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Arsitektur, Desain dan Perencanaan,
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, 60111
e-mail: eko_budi@urplan.its.ac.id

Abstrak—Kota Batam merupakan salah satu wilayah KPBPB di Indonesia yang memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia terutama dalam bidang investasi karena letaknya yang strategis yaitu berada di jalur perairan internasional. Akan tetapi nilai investasi yang masuk ke Kota Batam terus mengalami penurunan dan puncak penurunannya terjadi pada tahun 2017 di mana terdapat 36 perusahaan industri yang tutup serta nilai realisasi investasi yang juga menurun drastis. Hal ini disebabkan karena tiga faktor daya tarik investasi daerah yaitu faktor ketenagakerjaan, pelayanan infrastruktur serta lahan yang belum bekerja secara optimal di Kota Batam dan menyebabkan semakin tidak diminatnya investasi di Kota Batam terutama dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya-upaya yang diperlukan dalam rangka meningkatkan investasi di Kota Batam berdasarkan faktor-faktor daya tarik investasi daerah di tinjau dari preferensi investor/pengusaha. Pada proses perumusan arahan ini terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan/hambatan dari masing-masing variabel penelitian menggunakan analisis *fishbone* untuk mendapatkan akar permasalahan masing-masing variabel berdasarkan kondisi eksistengnya yang dapat menghambat masunya investasi di masa depan melalui *in-depth interview*. Setelah diketahui akar permasalahannya, maka dilanjutkan dengan analisis triangulasi untuk menentukan arahan peningkatan investasi daerah. Berdasarkan hasil analisis triangulasi di peroleh 12 arahan peningkatan investasi daerah di Kota Batam.

Kata Kunci—Arahan Peningkatan, Investasi Daerah, Ketenagakerjaan, Lahan, Pelayanan Infrastruktur.

I. PENDAHULUAN

INDONESIA merupakan salah satu negara berkembang dengan mayoritas wilayahnya merupakan wilayah kepulauan. Letak Indonesia yang berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia menjadikan perairan Indonesia sebagai salah satu urat nadi perdagangan Internasional. Harapannya dengan lokasi Indonesia yang strategis ini maka jumlah investor yang masuk ke Indonesia akan kian meningkat baik dari dalam maupun luar negeri. Investasi ini diperlukan dalam rangka membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga membantu pembiayaan pembangunan sehingga sumber dana yang digunakan tidak hanya berasal dari dana APBN maupun APBD yang sudah ada saja. Untuk mendukung potensi yang sudah ada ini, pada tahun 1970 dicanangkan pembangunan salah satu kawasan strategis dibidang perekonomian yaitu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)

yang berfungsi untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor.

Indonesia memerlukan banyak investasi terutama dari investor asing untuk membantu meningkatkan perekonomian domestik serta menutupi kebutuhan akan pembiayaan infrastruktur akibat masih rendahnya simpanan masyarakat di perbankan. Hal ini selaras dengan pendapat Friedman dan Alonso yang menyatakan bahwasannya investasi sebagai salah satu komponen yang mempengaruhi pengembangan wilayah [1]. Investasi ialah pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang [2]. Investasi merupakan “motor” suatu perekonomian di mana semakin tinggi nilai realisasi investasi di dalam suatu negara maka akan menunjukkan lajunya pertumbuhan ekonomi negara tersebut, sedangkan minimnya investasi yang di realisasikan akan menunjukkan lambannya laju pertumbuhan negara yang bersangkutan [3]. Selain sebagai salah satu faktor utama penentu keberhasilan pembangunan ekonomi, semakin tingginya investasi yang masuk juga dapat menambah jumlah lapangan pekerjaan di suatu negara atau daerah [4]. Hal inilah yang nantinya dapat memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi (PDB) dan penurunan angka kemiskinan sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Selain memiliki peran penting dalam pengembangan wilayah melalui peningkatan pertumbuhan ekonominya, investasi juga berperan sebagai indikator penentu tingkat daya saing daerah. Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu daerah dalam memperoleh pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap membuka diri pada persaingan baik dari dalam maupun internasional [5]. Tingkat daya saing daerah menjadi salah satu ukuran yang menentukan apakah suatu daerah potensial bagi investasi atau tidak di mana tingkat daya saing ini berlaku secara *global*. Salah satu alasan mengapa daerah maupun negara saling berkompetisi agar dapat meningkatkan investasi melalui kemampuan daerah untuk menarik masuknya modal asing, swasta dan modal publik. Selain itu, dengan semakin tingginya daya saing daerah juga akan berimplikasi terhadap peningkatan daya saing nasional suatu negara terutama dalam menghadapi tingginya persaingan daya saing *global*.

Kota Batam merupakan kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau dengan lokasinya yang sangat strategis yaitu berada di jalur pelayaran Internasional di mana seluruh wilayahnya dikelilingi oleh Selat Singapura dan dan Selat Malaka. Hal ini menjadi salah satu bentuk keuntungan geografis yang dimiliki Kota Batam. Berdasarkan PP No. 26

tahun 2008 tentang RTRW Nasional, Kota Batam memiliki fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional serta sebagai “titik sentuh” Kawasan Barat Indonesia ke Asia-Pasifik. Selain itu, Kota Batam juga menjadi perwakilan Indonesia sebagai bagian dari wilayah IMS-GT (Indonesia – Malaysia – Singapura *Growth Triangle*), yang menyebabkan kota ini menjadi kota dengan investasi terbesar di Indonesia. Kota Batam sebagai daerah tujuan utama investasi asing maupun domestik di Indonesia juga mengalami pasang surut dalam dunia investasi. Hal ini dapat dilihat dari total investasi asing dan domestik di Kota Batam yang memiliki rata-rata 10,31% pertahun pada tahun 1990-an. Akan tetapi, nilai investasi di Kota Batam mengalami penurunan dengan pertumbuhan rata-rata hanya mencapai 7,68% pertahun pada tahun 2000-an [6].

Semakin menurunnya realisasi investasi di Kota Batam dapat dilihat berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tahun 2013 hingga tahun 2017 yang diterbitkan oleh BKPM RI (2017) di mana ada tahun 2013, realisasi investasi PMA di Kota Batam mencapai 285,93 juta US\$, kemudian sedikit mengalami penurunan menjadi 285,18 juta US\$ pada tahun 2014. Pada tahun 2015, jumlah investasi di Kota Batam kembali meningkat tajam menjadi 474,06 juta US\$ akan tetapi hal ini tidak mampu dipertahankan pada dua tahun berikutnya yaitu pada tahun 2016 di mana realisasi investasi PMA di Kota Batam hanya mencapai 392,19 juta US\$ dan semakin menurun tajam menjadi 230,14 juta US\$ pada tahun 2017. Selain itu, berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat tahun 2015, Kota Batam berada di urutan ke-20 sebagai kota dengan Penanaman Modal Asing (PMA) terbesar di Indonesia di mana Kota Batam tertinggal jauh dari wilayah Jawa dan Kalimantan. Hal ini memperlihatkan semakin tidak diminatinya Kota Batam sebagai lokasi investasi oleh investor asing, terlebih mengingat adanya kemudahan berinvestasi yang lebih menjanjikan di negara lainnya di ASEAN seperti Thailand dan Malaysia yang menyebabkan Kota Batam semakin jauh dari pilihan lokasi berinvestasi para investor terutama investor asing.

Penurunan investasi di Kota Batam ini juga semakin terlihat dari banyaknya perusahaan baik perusahaan asing maupun perusahaan lokal yang tutup di Kota Batam. Berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan pada tahun 2017, sebanyak 36 perusahaan sudah tutup di Kota Batam. Hal ini menyebabkan ± 8.890 karyawan mengalami PHK. Adanya penutupan perusahaan ini menurut Bapak Cahya, Ketua APINDO Provinsi Kepulauan Riau (2018) disebabkan oleh dua faktor, pertama faktor *global/eksternal* yaitu terjadinya ketidakstabilan dan penurunan ekonomi global sehingga minimnya pesanan dari luar serta adanya penurunan harga minyak dan barang tambang yang berimbas kepada industri pipa dan galangan kapal serta terkait tingkat nilai UMK Kota Batam yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan kondisi perekonomian di Kota Batam yang sedang lesu saat ini. Sementara itu, menurut pendapat BP Batam, ada beberapa faktor pendorong lainnya yang menyebabkan pertumbuhan investasi di Kota Batam semakin terhambat yaitu faktor infrastruktur yang masih kurang memadai sehingga menimbulkan terjadinya peningkatan biaya logistik yang harus dibayarkan, faktor ketenagakerjaan yaitu banyaknya aksi demo buruh serta ‘mogok’ kerja yang terjadi

dan faktor lahan yaitu sulitnya investor baru mendapatkan kepastian pengalokasian lahan yang mereka ajukan sehingga berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui bahwasannya tiga faktor utama yang mempengaruhi menurunnya kondisi investasi di Kota Batam yang menjadi bagian dari kewenangan pemerintah daerah ialah faktor ketenagakerjaan, faktor pelayanan infrastruktur serta faktor lahan. Maka dari itu, perlu adanya arahan peningkatan iklim investasi untuk dapat mengembalikan Kota Batam kepada keadaan masa jayanya.

II. METODE ANALISIS

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan rasionalistik di mana pendekatan ini bersumber dari teori dan kebenaran empirik [7]. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya pendekatan ini bersifat komparansi dan juga untuk memverifikasi kebenaran teori dengan data faktual yang terjadi di lapangan [8]. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti mengumpulkan datanya dengan cara berinteraksi langsung dengan orang-orang di tempat penelitian [9].

B. Variabel Penelitian

Variabel pada penelitian ini berjumlah 9 variabel di mana terdapat 3 variabel pada indikator ketenagakerjaan, 4 variabel pada indikator pelayanan infrastruktur serta 2 variabel penyusun indikator lahan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.
Indikator dan Variabel Daya Tarik Investasi Daerah

Indikator	Variabel
Ketenagakerjaan	Kuantitas Tenaga Kerja
	Kualitas Tenaga Kerja UMK
Pelayanan Infrastruktur	Sarana Transportasi
	Jaringan Telekomunikasi
	Jaringan Listrik
	Jaringan Air
Lahan	Kemudahan Mendapatkan Akses Lahan Ketersediaan Lahan

Dasar pemilihan variabel daya tarik investasi daerah ini di dapatkan dari sintesa pustaka serta beberapa penelitian terdahulu mengenai investasi di daerah di mana akan dilakukan tabel *checklist* variabel dari 10 sumber yang berbeda.

Pada indikator ketenagakerjaan akan dibahas mengenai kondisi eksisting/faktual dari calon tenaga kerja di Kota Batam di mana indikator ini disusun oleh 3 variabel yaitu kuantitas tenaga kerja (ketersediaan jumlah penduduk usia produktif di suatu wilayah yang dapat mendukung pengembangan industri), kualitas tenaga kerja (mutu tenaga kerja yang tersedia) serta UMK (tingkat standar upah yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha kepada pegawai/buruh).

Selanjutnya indikator pelayanan infrastruktur yang akan membahas mengenai kondisi pelayanan berbagai jenis infrastruktur pendukung industri. Adapun infrastruktur tersebut antara lain sarana transportasi (kondisi pelayanan semua sarana transportasi yang mendukung berjalannya suatu industri), jaringan telekomunikasi (kondisi pelayanan prasarana jaringan telekomunikasi di lokasi industri), jaringan listrik (kondisi pelayanan prasarana jaringan listrik

di lokasi industri) dan juga jaringan air (kondisi pelayanan prasarana jaringan air bersih yang sudah dilayani oleh PDAM atau sejenisnya di lokasi industri).

Dan yang terakhir ialah indikator lahan di mana di dalam indikator ini terdapat 2 variabel yang menjadi bahan pertimbangan terkait lahan untuk investasi yaitu kemudahan mendapatkan akses lahan (tingkat kemudahan mendapatkan lahan untuk usaha) serta terkait ketersediaan lahan (tersedianya lahan dengan lokasi yang strategis dan terbebas dari konflik untuk pembangunan industri).

C. Metode Sampling

Metode sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling* di mana dalam menentukan sampel penelitian akan didasari pada suatu kriteria tertentu yang dibutuhkan dari penelitian. Adapun jumlah populasi yang dijadikan objek pada penelitian ini yaitu seluruh investor/pengusaha yang ada di Kota Batam dan seluruh institusi pemerintah daerah di Kota Batam. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan pada awal penelitian, maka diperoleh 5 perusahaan industri dan 3 institusi pemerintah daerah yang dapat dijadikan sampel penelitian.

D. Teknik Analisis Data

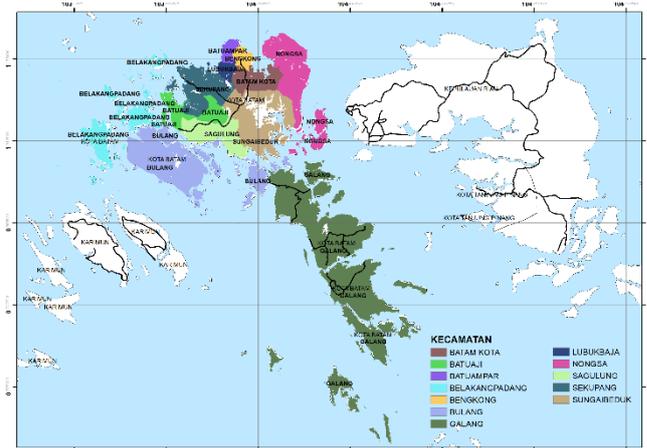
Dalam menyusun arahan peningkatan investasi di Kota Batam, terdapat dua sasaran yang harus dilakukan. Sasaran pertama ialah mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan yang terdapat pada masing-masing variabel penelitian yang dapat menghambat masuknya investasi ke Kota Batam di masa mendatang dengan menggunakan teknik analisis *fishbone*. Teknik analisis *fishbone* atau analisa tulang ikan dipakai untuk mengkategorikan berbagai sebab potensial dari satu masalah atau pokok persoalan dengan cara yang mudah dimengerti, terperinci dan rapi [10]. Pada sasaran pertama ini, sampel penelitian yang digunakan berasal dari perusahaan industri (pengusaha/investor) selaku objek dalam investasi. *Input* data yang diperlukan ialah indikator dan variabel daya tarik investasi daerah. Adapun tahapan analisisnya dengan melakukan *in-depth interview* dengan responden di mana akan ditanyakan terkait permasalahan apa saja yang pernah ditemui/dirasa oleh para responden berkaitan dengan variabel penelitian beserta akar permasalahannya. *Output* yang dihasilkan dari sasaran pertama ini ialah indikator dan variabel daya tarik investasi daerah apa saja yang masih memiliki masalah dalam pelaksanaannya yang dapat menghambat masuknya investasi ke Kota Batam di masa mendatang serta apa saja penyebab dan akar permasalahannya.

Selanjutnya, sasaran kedua atau merupakan sasaran terakhir penelitian ini akan menghasilkan *output* penelitian berupa arahan peningkatan investasi daerah di Kota Batam yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Batam ataupun Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam. *Input* data yang digunakan untuk memperoleh luaran tersebut ialah *output* dari sasaran pertama yang kemudian akan dibandingkan dengan fakta empiris terkait akar permasalahan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan responden penelitian dari pihak instansi pemerintah daerah serta kebijakan terkait akar permasalahan dari variabel penelitian. Pada sasaran kedua ini, metode analisis yang digunakan ialah analisis triangulasi. Analisis triangulasi ialah suatu pendekatan

analisis data yang mensitesa data dari berbagai sumber untuk menguji kredibilitas datanya [11].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Batam yang menjadi ruang lingkup wilayah pada penelitian ini meliputi 12 kecamatan dan 64 kelurahan yang masuk ke dalam wilayah administratif Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam. Luas wilayah kota ini yaitu 1.595 km² dengan total jumlah penduduknya mencapai 1.236.399 jiwa.



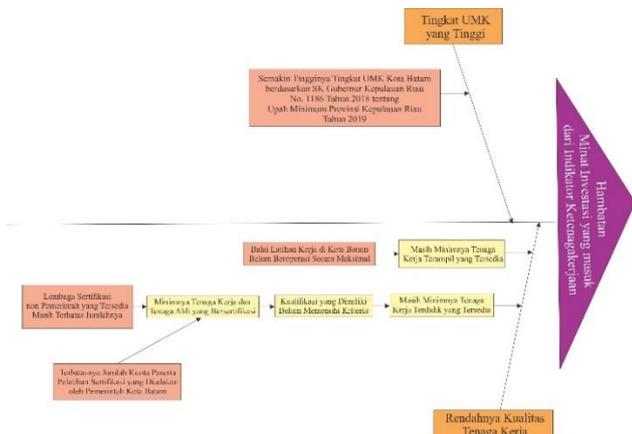
Gambar 1. Peta Administratif Kota Batam

E. Identifikasi Permasalahan pada Variabel Penelitian yang Dapat Menghambat Masuknya Investasi ke Kota Batam

Akar permasalahan pada sasaran pertama ini akan dianalisis menggunakan teknik analisis *fishbone* setelah melalui tahap *in-depth interview* dengan pengusaha/investor yang menjadi sampel penelitian di mana akan ditanyakan kepada masing-masing responden apakah menurut responden kesembilan variabel penelitian yang digunakan masih memiliki permasalahan yang menyebabkan adanya ketidaknyamanan dalam berinvestasi di Kota Batam. Pada tahap ini, digunakan wawancara terbuka di mana pertanyaan yang diajukan pada setiap responden dapat berbeda-beda tergantung dengan jawaban yang diberikan responden tersebut sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara kepada para responden, pada indikator pertama penelitian ini yaitu indikator ketenagakerjaan dari 3 variabel yang menyusunnya, terdapat 2 variabel yang masih memiliki masalah dan dapat menghambat masuknya investasi yaitu variabel kualitas tenaga kerja serta variabel UMK. Sedangkan untuk variabel kuantitas tenaga kerja di rasa sudah dalam kondisi yang baik oleh para responden. Hal ini dikarenakan sudah melimpahnya jumlah penduduk usia produktif yang ada di Kota Batam. Melimpahnya penduduk usia produktif ini dikarenakan banyaknya migrasi yang masuk ke Kota Batam dalam rangka mencari pekerjaan. Selain itu, dari data Kota Batam Dalam Angka Tahun 2018 yang diterbitkan oleh BPS Kota Batam dapat diketahui pula bahwasannya jumlah penduduk usia angkatan kerja (15 tahun – 59 tahun) di Kota Batam pada tahun 2017 mendominasi jumlah penduduk Kota Batam keseluruhan yaitu mencapai 67,43% penduduk Kota Batam sehingga sudah dapat disimpulkan baik berdasarkan data

sekunder maupun primer (hasil wawancara dengan responden), ketersediaan tenaga kerja usia produktif di Kota Batam sudah dapat mendukung masuknya investasi ke Kota Batam. Adapun di bawah ini merupakan diagram tulang ikan dari indikator ketenagakerjaan.



Gambar 2. Diagram Tulang Ikan Indikator Ketenagakerjaan

Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwasannya variabel UMK dan kualitas tenaga kerja masih memiliki masalah yang dapat menghambat masuknya investasi ke Kota Batam di masa mendatang. Pada variabel kualitas tenaga kerja ditemukan dua permasalahan dengan tiga akar permasalahan yang harus segera diselesaikan agar investasi yang masuk ke Kota Batam juga dapat meningkat. Adapun permasalahan terkait variabel kedua dalam indikator ketenagakerjaan ini yang dapat menghambat masuknya investasi ke Kota Batam yaitu masih minimnya tenaga kerja terampil serta tenaga kerja terdidik yang tersedia. Minimnya tenaga kerja terampil yang ada di Kota Batam ini menurut para responden disebabkan karena Balai Latihan Kerja (BLK) yang seharusnya berperan sebagai wadah kegiatan pelatihan tenaga kerja belum beroperasi secara optimal di Kota Batam. Untuk permasalahan yang kedua yaitu minimnya tenaga kerja terdidik disebabkan karena kualifikasi yang dimiliki oleh tenaga kerja masih belum memenuhi kriteria. Minimnya kualifikasi yang dimiliki ini terjadi karena masih kurangnya juga tenaga kerja dan tenaga ahli yang tersedia yang sudah bersertifikasi. Minimnya sertifikasi tenaga kerja ini disebabkan oleh dua akar permasalahan utama yaitu terbatasnya jumlah lembaga sertifikasi non pemerintah yang tersedia serta terbatasnya jumlah kuota peserta pelatihan sertifikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Lembaga sertifikasi non pemerintah ini diperlukan oleh tenaga kerja agar tenaga kerja yang sebelumnya mendaftarkan dirinya pada pelatihan sertifikasi yang di adakan oleh Dinas Tenaga Kerja akan tetapi gagal tetap dapat mengikuti pelatihan sertifikasi lainnya untuk meningkatkan kompetensinya tanpa harus menunggu pemerintah mengadakan pelatihan sertifikasi tersebut lagi di tahun berikutnya. Adapun penyebab utama seorang tenaga kerja gagal mengikuti pelatihan sertifikasi yang diadakan pemerintah ialah dikarenakan kuota yang tersedia terbatas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan terdapat tiga akar permasalahan di dalam variabel kualitas tenaga kerja yang menyebabkan masih kurangnya mutu calon tenaga kerja yang dapat memenuhi persyaratan pekerja di industri Kota Batam dan dapat menurunkan minat investor/pengusaha ke depan.

Variabel ketiga yaitu variabel UMK juga dianggap masih memiliki masalah yang dapat menghambat masuknya pengusaha/investor ke Kota Batam. Adapun permasalahan utama yang terjadi ialah tingginya tingkat UMK Kota Batam berdasarkan SK Gubernur Kepulauan Riau No. 1186 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 di mana nilai UMK Kota Batam sudah mencapai Rp 3.806.358,00 (mengalami peningkatan 8,03% dibanding tahun 2018). Angka ini dianggap pengusaha/investor terlalu tinggi terlebih jika dibandingkan dengan upah minimum Negara-negara ASEAN di sekitarnya seperti Malaysia yang hanya mencapai ± Rp 3.500.000,00 dan Vietnam ± Rp 2.700.000,00. Tingginya tingkat UMK ini dapat menyebabkan Kota Batam menjadi tidak kompetitif lagi bagi pengusaha/investor. Tingkat UMK ini ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan serta hasil keputusan gubernur (yang di dasari dari data kebutuhan hidup layak (KHL), rekomendasi bupati/wali kota serta saran pertimbangan dewan pengupahan provinsi) sesuai Pasal 44 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Adapun di bawah ini merupakan tabel besaran UMK Kota Batam dari tahun 2015 – 2019.

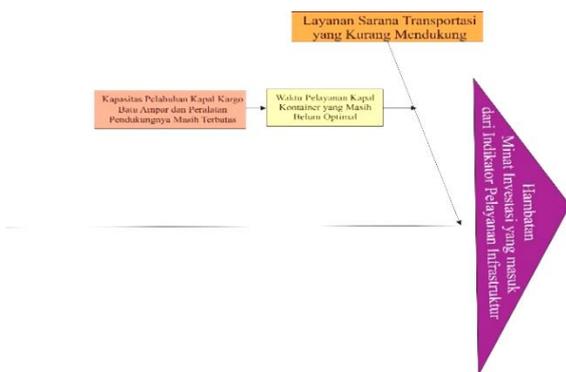
Tabel 2.
Nilai UMK Kota Batam Tahun 2015 - 2019

Tahun	Nilai UMK Kota Batam (Juta Rupiah)
2015	Rp 2.685.100,00
2016	Rp 2.994.111, 00
2017	Rp 3.241.126,00
2018	Rp 3.523.427,00
2019	Rp 3.806.358,00

Indikator selanjutnya pada penelitian ini ialah indikator pelayanan infrastruktur yang disusun oleh empat variabel yaitu variabel sarana transportasi, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik dan jaringan air. Indikator ini membahas mengenai bagaimana tingkat pelayanan suatu infrastruktur daerah mendukung keinginan seorang pengusaha/investor menanamkan modalnya di suatu daerah dan sejauh apa peran/fungsi dari masing-masing infrastruktur tersebut. Di antara keempat variabel tersebut, hanya variabel sarana transportasi saja yang masih memiliki masalah yang dapat menghambat masuknya investasi di Kota Batam ke depannya. Sementara itu, untuk ketiga variabel lainnya yaitu variabel jaringan telekomunikasi, jaringan listrik serta jaringan air menurut kelima responden, sudah tidak memiliki permasalahan yang dapat menghambat masuknya penanaman modal baik dari PMDN maupun PMA ke Kota Batam sebaliknya ketiga variabel ini dapat dijadikan sebagai faktor penarik Kota Batam dalam meningkatkan minat investor/pengusaha untuk menanamkan modalnya di Kota Batam. Di bawah ini merupakan *diagram fishbone* dari indikator pelayanan infrastruktur.

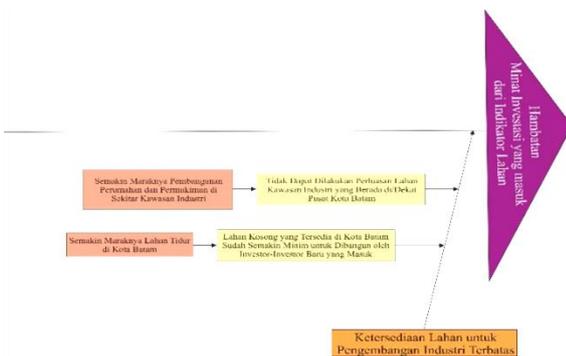
Menurut para responden layanan sarana transportasi yang di Kota Batam saat ini masih kurang mendukung keberlangsungan investasi. Adapun permasalahan layanan sarana transportasi yang kurang mendukung yang dirasakan oleh para responden ini ialah terkait dengan waktu pelayanan kapal kontainer yang masih belum optimal. Hal ini terjadi karena kapasitas pelabuhan kapal kargo di Pelabuhan Batu Ampar Kota Batam masih terbatas di mana pelabuhan ini hanya mampu menampung sekitar 200.000 – 350.000 TEUs/tahun serta peralatan pendukung bongkar muat barang

di Pelabuhan Batu Ampar juga masih terbatas. Hal ini memberikan kerugian bagi pemilik industri serta bagi Kota Batam sendiri dalam menarik investor yang masuk. *Crane* yang digunakan saat ini oleh Pelabuhan Batu Ampar juga tergolong belum canggih sehingga kapasitas angkutan yang dapat dilakukan sangat kecil dan memperlama pengerjaan bongkar muat barang yaitu dalam satu jam hanya bisa mengangkut 5 TEUs saja. Karena rendahnya kemampuan *crane* ini, banyak kapal pengangkut barang terpaksa menginap hingga dua hari saat mengangkut barang dari Kota Batam dan membuat alur pengiriman barang menjadi lambat. Sehingga dapat disimpulkan akar permasalahan pada indikator pelayanan transportasi ini ialah kapasitas Pelabuhan Kapal Kargo Batu Ampar dan peralatan pendukungnya masih terbatas



Gambar 3. Diagram Tulang Ikan Indikator Pelayanan Infrastruktur

Indikator terakhir pada penelitian ini ialah indikator lahan di mana indikator ini hanya memiliki dua variabel yang memengaruhi yaitu variabel kemudahan mendapatkan akses lahan dan variabel ketersediaan lahan. Pada indikator lahan ini akan dilihat bagaimana tingkat kemudahan mendapatkan lahan dengan lokasi yang strategis di Kota Batam. Di antara kedua variabel tersebut, variabel ketersediaan lahan masih dirasa memiliki masalah yang dapat menghambat masuknya investasi di Kota Batam ke depannya menurut para responden, sedangkan untuk variabel kemudahan mendapatkan akses lahan sudah tidak ada permasalahan yang ditemukan oleh responden berdasarkan kondisi eksistingsnya di Kota Batam. Hal ini dikarenakan selama ini pemerintah sudah sangat kooperatif dalam membantu investor/pengusaha menemukan lahan yang sesuai peruntukan jenis industri investor serta dilengkapi dengan infrastruktur pendukung yang memadai. Di bawah ini merupakan *diagram fishbone* dari indikator lahan.



Gambar 4. Diagram Tulang Ikan Indikator Lahan

Berkebalikan dengan tingkat kemudahan mendapatkan akses lahan di Kota Batam yang sudah baik, tingkat ketersediaan lahan untuk pengembangan industri di Kota

Batam masih terbatas dan memiliki beberapa permasalahan yang dapat menghambat masuknya investasi di kota ini menurut para responden. Permasalahan pertama yang menghambat masuknya investor yaitu terkait tidak dapat dilakukannya perluasan lahan disebabkan karena lahan yang tersedia di sekitar kawasan industri sudah dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman di sekitar Kawasan Industri. Selanjutnya permasalahan ketersediaan lahan yang juga dirasa oleh responden yaitu terkait lahan kosong yang tersedia di Kota Batam yang sudah semakin minim untuk dibangun oleh investor-investor yang baru masuk ke Kota Batam. Hal ini terjadi karena semakin maraknya lahan tidur di Kota Batam. Berdasarkan data dari hasil pemantauan dan evaluasi lahan yang sudah dilakukan oleh BP Batam (2019), diketahui bahwa total luas lahan tidur di Kota Batam saat ini ialah 8.203,99 hektare (Ha). Adapun lahan tidur ini tersebar di seluruh daerah-daerah di Kota Batam dengan mayoritas lahan tidur berada di wilayah *mainland* Kota Batam. Sejauh ini kegiatan pemantauan dan evaluasi sudah dilakukan oleh BP Batam sebagai bentuk kesungguhan BP Batam dalam mendukung peningkatan investasi yang masuk ke Kota Batam karena lahan merupakan fasilitas utama untuk investasi.

Sehingga berdasarkan hasil analisis *fishbone* di atas, dapat diketahui bahwasannya dari 9 variabel penelitian yang digunakan hanya 4 variabel saja yang masih memiliki permasalahan. Adapun akar permasalahan yang termasuk ke dalam kewenangan pemerintah daerah dan dapat menghambat masuknya investasi ke Kota Batam di masa mendatang berdasarkan sudut pandang pengusaha/investor yaitu :

1. Tingkat UMK Kota Batam yang tergolong tinggi
2. Balai Latihan Kerja di Kota Batam belum beroperasi secara maksimal
3. Lembaga sertifikasi non pemerintah yang tersedia masih terbatas jumlahnya
4. Adanya keterbatasan kuota peserta pelatihan sertifikasi yang diadakan oleh pemerintah daerah
5. Kapasitas Pelabuhan Kapal Kargo Batu Ampar dan peralatan pendukungnya masih terbatas
6. Semakin maraknya pembangunan perumahan dan permukiman di sekitar kawasan industri
7. Semakin maraknya lahan tidur di Kota Batam sehingga ketersediaan lahan kosong di Kota Batam semakin berkurang

F. Perumusan Arahan Peningkatan Investasi di Kota Batam

Sasaran terakhir pada penelitian ini ialah merumuskan arahan peningkatan investasi daerah di Kota Batam di mana arahan ini diperoleh dari hasil analisis triangulasi antara luaran sasaran pertama yaitu akar permasalahan/hambatan minat investasi yang masuk ke Kota Batam dari masing-masing variabel menurut pengusaha/investor yang kemudian akan dibandingkan dengan kondisi eksisting dari tiap akar permasalahan tersebut menurut pihak pemerintah daerah (sebagai bentuk verifikasi data) serta kebijakan dan/atau strategi dan/atau program dan/atau kegiatan terkait yang menjadi landasan untuk masing-masing akar permasalahan. Adapun contoh tabel analisis triangulasi yang digunakan pada sasaran kedua ini ialah sebagai berikut.

Tabel 3.
Contoh Tabel Hasil Analisis Triangulasi

No.	Akar Permasalahan yang menjadi Hambatan Minat Investasi yang Masuk ke Kota Batam	Kondisi Eksisting Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Pemerintah Daerah	Kebijakan dan/atau Strategi dan/atau Program dan/atau Kegiatan Terkait	Arahan Peningkatan Iklim Investasi Daerah di Kota Batam
1.	Tingkat UMK Kota Batam yang Tergolong Tinggi	Tingkat UMK Kota Batam yang sudah mencapai Rp 3.806.358,00 berdasarkan hasil keputusan SK Gubernur Kepulauan Riau No. 1186 Tahun 2018 tentang Minimum Provisi Kepulauan Riau Tahun 2019 ini tergolong tinggi jika dibandingkan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Batam saat ini. Tingginya UMK Kota Batam tersebut menyebabkan adanya beberapa perusahaan yang memilih pindah ke Negara lain di ASEAN yang memiliki nilai UMK lebih rendah seperti Negara Vietnam yang memiliki tingkat UMK lebih murah (± Rp 2.700.000,00)	Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2016 - 2021, berikut adalah arahan kebijakan dan/atau strategi dan/atau program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Batam : Melakukan penyusunan dan perumusan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam	Merumuskan tingkat UMK dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat serta tingkat KHL

Tabel di atas merupakan contoh proses tahapan analisis triangulasi yang digunakan pada penelitian ini. Adapun instansi pemerintah daerah yang menjadi responden penelitian ialah Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam serta Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Kota Batam di mana untuk mendapatkan data verifikasi kondisi eksisting ini dilakukan wawancara secara *in-depth interview* mengenai akar permasalahan masing-masing hambatan yang di rasakan oleh investor/pengusaha sebelumnya apakah benar adanya dan bagaimana fakta empiris mengenai permasalahan tersebut. Kemudian untuk kebijakan yang digunakan berasal dari RPJMD Kota Batam Tahun 2016 – 2021 serta Renstra (Rencana Strategis) SKPD Instansi Pemerintah Daerah terkait di Kota Batam (Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2016 – 2021, Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Tahun 2016 – 2021 dan Renstra Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kota Batam (BP-Batam) Tahun 2015 – 2019).

Berdasarkan hasil analisis triangulasi pada penelitian ini, diperoleh 12 arahan peningkatan investasi daerah di Kota Batam di mana masing-masing terdapat 5 arahan untuk faktor

ketenagakerjaan, 3 arahan untuk faktor pelayanan infrastruktur dan 4 arahan untuk faktor lahan. Arahan-arahan tersebut antara lain :

1. Merumuskan tingkat UMK dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat serta tingkat KHL
2. Melakukan percepatan pembangunan Balai Latihan Kerja dalam mendukung peningkatan kompetensi
3. Melakukan kerjasama dengan Asosiasi Lembaga Sertifikasi Indonesia (ALSI) untuk pembentukan lembaga sertifikasi sesuai kebutuhan industri
4. Melakukan pengalokasian sumber dana khusus untuk pelaksanaan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal
5. Menyusun standar kompetensi pelatihan sertifikasi tiap bidang usaha industri
6. Melakukan percepatan pengembangan Pelabuhan Batu Ampar untuk mendukung peningkatan kapasitas logistik disesuaikan dengan rencana ekspansi pelabuhan yang sudah disusun
7. Meningkatkan layanan angkutan peti kemas nasional dan internasional Pelabuhan Batu Ampar hingga 2.5000.000 TEUs/tahun dalam mendukung pengembangan Pelabuhan Batu Ampar menjadi pelabuhan hub internasional
8. Melakukan modernisasi *Harbor Mobile Crane* Pelabuhan Batu Ampar untuk mendukung peningkatan bongkar muat dan masuk barang hingga 30 kotak kargo/jam
9. Melakukan penyusunan RDTRK sebagai bentuk pengawasan dan penindakan penggunaan lahan pada kawasan yang cepat berkembang
10. Menyusun peraturan daerah terkait pengendalian pembangunan *landed housing* menjadi *vertical housing*
11. Mengoptimalkan peran BP Batam dalam mengawasi dan mengevaluasi keberadaan lahan tidur
12. Melakukan kerjasama antara BP Batam, Pemerintah Kota Batam serta Kantor Pertanahan dalam menertibkan lahan tidur.

IV. KESIMPULAN

Dari 9 variabel penelitian yang masuk ke ketiga faktor investasi tersebut, hanya lima variabel saja dengan 7 akar permasalahan yang diperoleh sebagai hasil analisis dari analisis *fishbone* dengan jumlah akar permasalahan terbanyak terdapat pada faktor ketenagakerjaan dengan 4 akar permasalahan.

Untuk arahan peningkatan investasi di Kota Batam sendiri, diperoleh 12 arahan peningkatan investasi yang masuk ke tingkat kewenangan pemerintah daerah dengan 5 arahan yang dirumuskan untuk faktor ketenagakerjaan yaitu kualitas tenaga kerja dan UMK, 3 arahan untuk faktor pelayanan infrastruktur yaitu sarana transportasi serta 4 arahan untuk faktor lahan yaitu terkait ketersediaan lahan untuk pembangunan industri di Kota Batam.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu khususnya

pengusaha/investor di Kota Batam yang bertindak sebagai responden pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. Friedman and W. Alonso, *Regional Development and Planning: A Reader*. Massachusetts: MIT Press, 1965.
- [2] Mulyadi, *Akutansi Manajemen*, Ke Tiga. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- [3] R. Suherman, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1956.
- [4] Suwarno, "Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing pada Industri Manufaktur di Jawa Timur," *J. Ris. Ekon. Bisnis*, vol. 8, no. 1, 2008.
- [5] S. A. Ritonga and P. Hidayat, "Analisis Daya Saing Ekonomi Kabupaten Batu Baru," *J. Ekon. dan Keuang.*, vol. 3, no. 5, pp. 323–334, 2015.
- [6] Tim Batam Outlook PPDSI, "Batam Economic Outlook," Batam, 2011.
- [7] N. Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Telaah Positivistik Rasionalistik, Fenomenologik Realisme Metaphisik*, Edisi Ke L. Yogyakarta: Yogyakarta Rake Sarasin, 1990.
- [8] R. Supriharjo, D. Rahmawati, and K. Pradinie, *Diktat Metodologi Penelitian*. Surabaya: PWK ITS, 2013.
- [9] J. H. McMillan and S. Schumacher, *Research in Education*. New Jersey: Pearson Education, 2003.
- [10] N. Fauziah, "Aplikasi Fishbone Analysis dalam Meningkatkan Kualitas Produksi Teh pada PT Rumpun Sari Kemuning, Kabupaten Karanganyar," Universitas Sebelas Maret, 2009.
- [11] B. S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif," *J. Teknol. Pendidik.*, vol. 10, no. 1, pp. 55–56, 2010.